

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
KERJASAMA DALAM PENJUALAN ES DAWET**
(Studi Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara
di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Oleh :
WIDYA SANTIKA PUTRI
NPM. 1721030454



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
KERJASAMA DALAM PENJUALAN ES DAWET**
(Studi Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara
di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :
WIDYA SANTIKA PUTRI
NPM. 1721030454

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.
Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag. MHI.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Pada Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat sejumlah pedagang es dawet dengan merk dagang yang mereka jual sama. Sistem yang dipergunakan oleh para pedagang es dawet tersebut ialah sistem kerjasama. Dalam hukum Islam, sistem ini dikenal dengan *mudharabah*, yang merupakan suatu kerjasama dimana pemilik modal tidak ikut serta dalam mengelola usaha namun hanya sebagai pengawasan saja. Sistem *mudharabah* menganut prinsip-prinsip yang mengedepankan nilai kejujuran dan keadilan.

Namun pada praktik kerjasama penjualan dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh para pedagang es dawet antara pedagang dan pemilik es dawet tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga mereka menggunakan rasa saling percaya. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam kajian penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama antar pedagang dan pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik kerjasama antar pedagang dan Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama antar pedagang dan pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kerjasama dalam penjualan es dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam praktik kerjasama antar pedagang dan pemilik es dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, tidak terdapat kesesuaian yang utuh dalam pembagian keuntungan. Pemilik usaha dan para pedagang masih belum memiliki akad yang jelas diawal perjanjian dalam pembagian keuntungan oleh para pihak sebelum bekerjasama. Dikarenakan permasalahan tersebut, keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak menjadi tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad yaitu dihitung dari nisbah bagi hasil yang

telah disepakati. Kerja sama antara pedagang dan pemilik modal Dawet Ayu Manohara di Gedong Tataan mengandung unsur ketidakjelasan dan menjadikan akad kerja sama bagi hasil tersebut menjadi fasid (rusak). Ketidakjelasan sendiri merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian praktik kerjasama es dawet Ayu Manohara antara pemilik dan pedagang ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam sehingga belum bisa dikatakan sah sepenuhnya karena di dalamnya masih terdapat masalah dengan kesepakatan yang telah disepakati ketika akad antara pemilik usaha dan pedagang.





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN PROVINSI LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung

SURAT PERYATAAN

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widya Santika Putri
NIM : 1721030454
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara Di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun aduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 22 Oktober 2021

Penulis



Widya Santika Putri
NPM. 1721030454



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi
Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu
Manohara Di Alun-Alun Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran)**
Nama : **Widya Santika Putri**
NPM : **1721030454**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

**untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I


Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M. H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II


Badruzzaman, S.Ag.M.H.I
NIP. 196806241997031003

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukaramé 1 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Parktik
Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang dan
Pemilik Es Dawet Ayu Manohara Di Alun-Alun Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran)”** ditulis oleh **Widya Santika Putri NPM
1721030454** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** telah diujikan
dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada
hari/tanggal : **Rabu, 06 Oktober 2021**

TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I

(......)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

(......)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

(......)

Penguji II : Dr. H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag.M. H.

(......)

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

(......)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Badruddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda : *‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada ayahku Muhammad Suhendar, Amd.Kep dan Ibuku Damsiana,Amd.Keb yang dengan do'a dan kasih sayangnya selalu memberi dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih kepada nenekku Hj.Ainun tersayang yang selalu memberikan dukungan serta nasehat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, kakakku Dina Amelia Sari,S.Pd terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Provinsi Lampung sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan yang selalu ku banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Widya Santika Putri adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Ayahanda Muhammad Suhendar dan Ibunda Damsiana, penulis dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 1999.

Pendidikan pertama dimulai dari TK Mathlaul Anwar Margodadi kecamatan Waylima kabupaten Pesawaran pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pada SDN 1 Wayharong kecamatan Waylima kabupaten Pesawaran pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada Sekolah SMPN 1 Kalianda kecamatan kalianda kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2014, dan kemudian melanjutkan pada sekolah SMAN 1 Gedong Tataan kabupaten Pesawaran pada tahun 2017.

Bandar Lampung, 6 Oktober 2021

Penulis

Widya Santika Putri

NPM: 1721030454

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa dihaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Parktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara Di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”.

Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) di jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Provinsi Lampung.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Provinsi Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Provinsi Lampung.
3. Dr.H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H. sebagai pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag.MHI. Sebagai pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Provinsi Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa.
5. Kepada ayahku Muhammad Suhendar Amd.Kep dan ibuku Damsiana Amd.Keb terimakasih telah mendoa'akan dan memberi motivasi serta dukungan selalu tanpa rasa lelah

6. Kepada teman-teman satu angkatan tahun 2017 hukum ekonomi syariah kelas G yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang memberikan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 semoga kita selalu diberi kesehatan agar kelak bisa bertemu di lain kesempatan.
8. Teman-teman sekaligus keluarga besar Shafa Tasya Maryam, Dinda Ayu Natasyia, Siti Nurlaili, Nanda Ayu Daroza, Via Rizky, Rustom Nawawi, Roni Asdani, Gustur Muamar khadafi, Rizki Ramadan, M.Putra Sai Helau, Dimas Fakhrrur, M.Fajri Fadillah terimakasih telah membantuan memberikan dukungan dan dorongan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Rekan-rekan penulis angkatan 2017 Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah
10. Almamater UIN Raden Intan Provinsi Lampung

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT. Menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2021
Penulis

Widya Santika Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Akad	18
2. Dasar Hukum Akad	20
3. Rukun dan Syarat Akad	21
4. Prinsip-Prinsip Akad	26
5. Berakhirnya Akad	28
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Mudharabah</i>	33
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	38
4. Macam-Macam <i>Mudharabah</i>	41

5. Hak dan Kewajiban dalam <i>Mudharabah</i>	42
6. Hal-Hal yang Dilarang dalam <i>Mudharabah</i>	44
7. Batal dan Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	44

BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian	47
1. Sejarah Es Dawet Ayu Manohara	47
2. Awal Mula Munculnya Es Dawet Ayu Manohara di Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.....	48
3. Alasan Bekerja Sebagai Pedagang Es Dawet ...	49
B. Praktik Kerjasama Penjualan Es Dawet Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara...	53

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Kerjasama Antara Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara Di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	59
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Antar Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini.\

Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam TentangPraktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”**. Selanjutnya penulis tegaskan beberapa Istilah penting yang terdapat pada judul tersebut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat; (sesudah menyelidiki, mempelajari); perbuatan meninjau
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam¹.
3. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau perusahaan untuk mencari suatu keuntungan atau tujuan bersama.
4. Penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi, dan memberi petunjuk agar pembelian dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan kedua belah pihak.

¹Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1995), hlm.44.

5. Es Dawet merupakan minuman khas Jawa yang terbuat dari tepung beras ataupun tepung beras ketan, disajikan dengan es parut serta gula merah cair dan santan. Rasa minuman ini manis dan gurih.

Berdasarkan penegasan judul dapat dirumuskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran) ditinjau dari praktik kerjasama menurut pandangan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan manusia sosial yang hidup secara timbal balik antara sesama manusia hidup dalam mencukupi kebutuhan hidup. Artinya, bahwa manusia tersebut tidak akan dapat bertahan hidup tanpa adanya interaksi dengan makhluk lain. Manusia yang memiliki sifat ketergantungan antara sesama manusia umumnya meliputi segala aspek kehidupan terutama dalam hal perjanjian dan kontrak. Unsur ketergantungan itulah yang membuat manusia akan saling membutuhkan dalam bentuk kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dapat meliputi hal yang dikehendaki oleh para pihak yang berpartisipasi dalam kerjasama itu.

Kerjasama dalam hukum Islam salah satunya berupa, yaitu akad *Mudharabah*. *Mudharabah* sendiri yaitu suatu bentuk kerjasama yang modal berasal dari pihak pemilik dana atau modal saja dan pihak lain berkewajiban untuk mengelola dana modal sekaligus mengurus segala yang dibutuhkan dalam kerjasama itu.

Mudharabah sendiri berarti memikul atau berjalan. *Mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah pemilik modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal dengan syarat bahwa hasil yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian bersama. Praktik kerjasama bagi hasil

adalah perjanjian yang dibolehkan dalam transaksi islam selama tidak menentang syariat Islam sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29).*

Akad *Mudharabah* merupakan suatu kerjasama pemilik modal tidak ikut serta dalam mengelola usaha namun hanya sebatas pengawasan saja. Semua pengelolaan mutlak milik pengelola dana modal semata. Dalam hal ini, pemilik dana modal boleh memberikan arahan manajemen selama tidak merugikan pekerja. Sedangkan pengelola dana berkewajiban memegang amanah yang disepakati dalam kontak kerja.

Seperti yang kita ketahui jenis usaha pedagang kaki lima adalah masuk kategori usaha berskala kecil, tujuan utama mereka hanyalah sekedar untuk bisa memenuhi kebutuhan primer mereka sehari-hari. Sehingga strategi prasarana yang mereka tetapkan masih sederhana atau jika diamati kerja mereka sekedar asal laku dan memperoleh laba². Adapun waralaba Syariah, sistim pembagian keuntungannya menggunakan sistim bagi hasil.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama antara pemilik dan pedagang es

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pres.

dawet serta pembagian dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S Al-Baqarah : 198)

Pada Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat sejumlah pedagang es dawet dengan merk dagang yang mereka jual sama. Penulis melihat suatu fenomena yang dapat dikaji sehingga dapat membantu warga masyarakat mengetahui informasi penting akan fenomena ini. es dawet yang ada di Alun-Alun Gedong Tataan sebelumnya pernah menjalankan sebanyak 6 gerobak, namun semenjak adanya pandemi covid-19 mereka hanya menggerakkan 4 gerobak saja dan letaknya pun tidak begitu berjauhan, sehingga penulis mencoba untuk melakukan kegiatan wawancara kepada salah satu pedagang es dawet di Alun-Alun gedong tataan kabupaten Pesawaran tersebut. Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu pedagang es dawet tersebut penulis mengetahui praktik kerjasama yang dilakukan oleh pedagang tersebut ternyata merupakan usaha yang dilakukan secara kekeluargaan, yang di mana pedagang es dawet yang ada di Alun-Alun Gedong Tataan merupakan sanak saudara yang telah bertahun tahun berjualan di tempat tersebut.

Usaha ini dimulai sejak tahun 2005 hingga sekarang. Praktik kerjasama yang diterapkan oleh pedagang es dawet tersebut adalah praktik kerjasama dan bagi hasil 60 persen untuk pemilik modal dan 40 persen untuk pedagang di mana mereka berjualan dari pagi hingga sore hari, kemudian setelah selesai berjualan mereka kembali ke rumah dari pemilik es dawet tersebut.

Pada praktik kerjasama yang dilakukan oleh pedagang es dawet tersebut tidak terdapat akad di awal dalam sistem pembagian hasil atau keuntungan nya, karena pedagang dan

pemilik es dawet tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan jadi mereka hanya menggunakan rasa saling percaya saja, tetapi dalam praktik kerjasama seperti itu sudah termasuk dalam unsur kecurangan karena tidak adanya kontrak kerjasama yang jelas, dalam artian tidak adanya bentuk akad tertulis baik secara autentik maupun akta di bawah tangan tentang kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dan juga jika terjadi kemungkinan adanya kerugian maka pihak yang mempunyai modal yang akan menanggung kerugian tersebut, disinilah penulis melihat suatu permasalahan yang cukup kompleks.

Adanya ketidakjelasan bentuk praktik kerjasama yang disetujui di awal dapat menimbulkan masalah terhadap pembagian hasil dan pertanggunggaan kerugian dikemudian hari. Alasannya dikarenakan pemilik es dawet tersebut tidak memberikan ketetapan kepada pedagang untuk memberikan setoran uang dengan jumlah yang jelas, tetapi hanya dengan hitungan berapa jumlah gelas yang telah terjual saja, hal ini bisa saja membuat pengelola dana atau *Mudharib* itu sendiri melakukan kecurangan terhadap pemilik Es Dawet tersebut.

Dengan demikian pengelola dana atau yang disebut *Mudharib* berarti sudah mengambil hak orang lain yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Praktik kecurangan yang biasa terjadi adalah memanipulasi jumlah gelas yang telah terjual oleh pedagang yang seharusnya terjual 10 gelas namun yang diserahkan kepada pemilik modal adalah berjumlah 8 gelas saja. Dalam hal ini sudah cukup jelas tindak kecurangan yang dilakukan oleh pedagang kepada pemilik modal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.³

Berdasarkan pemaparan tersebut terdapat beberapa hal yang penulis dapat kemukakan dalam praktik kerjasama penjualan Es Dawet tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum Islam

³ Suprianto, Wawancara terhadap pemilik Es Dawet Ayu Manohara, (Alun-Alun Gedong Tataan: 10 Oktober 2020).

Tentang Praktik Kerjasama Penjualan Es Dawet (Studi pada pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang diteliti adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik kerjasama dalam penjualan Es Dawet di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Praktik kerjasama antar pedagang dan pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama antar pedagang dan pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk meneliti tinjauan hukum islam tentang praktik kerjasama dalam penjualan Es Dawet di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kerjasama dalam penjualan Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan tinjauan hukum Islam tentang kerjasama dalam penjualan es dawet di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka adalah kajian literature atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

1. Skripsi karya Kurniati yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet Di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan"*. Tahun 2016. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa bentuk akad dalam bagi hasil *mudharabah* dan akadnya secara lisan. Bentuk akad ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Pembagian keuntungan sudah sesuai dengan hukum Islam. Langkah-

langkah penyelesaian sengketa di Desa Tegalombo dengan cara musyawarah, dan sudah sesuai dengan hukum Islam.⁴

2. Skripsi karya Elga Falidia Naviri yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*". Tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu perhitungan bagi hasil telah sesuai dengan ketentuan prinsip *mudharabah* karena dalam pembagian bagi hasil sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh para pihak diawal kerjasama, serta penanggungan kerugian dalam kerjasama pertanian tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat perjanjian mengenai penanggungan kerugian masih dibebankan kepada salah satu pihak yaitu *mudharib* maka dalam penanggungan kerugian tidak sesuai dengan muamalah dalam hukum Islam.⁵
3. Skripsi karya Rusita Fitriana Arum Pratiwi, yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan Tengkulak Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*". Tahun 2019. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu pertama, akad kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan, terdapat dua model akad kerjasama yaitu pertama, akad kerjasama tanpa syarat telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *Mudharabah* dan kedua, akad kerjasama dengan syarat, belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya persyaratan dalam kerjasama tersebut menghalangi pengelola usaha untuk menjalankan usaha sesuai keahliannya serta belum sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah*. Kedua Bagi hasil kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan, yaitu pembagian keuntungan kedua model

⁴Kurniati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), i.

⁵Elga Falidia Naviri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), i.

akad kerjasama tersebut jumlahnya adalah sama karena pekerjaan yang dilakukan juga sama dan telah memenuhi unsur keadilan serta telah sesuai dengan ketentuan akad *Mudharabah* yaitu sepertiga atau setengah dari keuntungan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, Penanggungan kerugian kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan, yaitu telah sesuai dengan hukum Islam, karena penanggungan kerugian dalam kedua model kerjasama tersebut ditanggung oleh pemilik modal sedangkan kerugian yang dialami oleh tengkulak dalam kerjasama tersebut berupa rugi waktu dan tenaga selama menjalankan usaha.⁶

4. Skripsi Muhammad Syafi'udin yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*" Tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa perjanjian kerjasama gaduh kambing antara pemilik dengan pemelihara kambing sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat *mudharabah* sudah terpenuhi, Pola pembagian keuntungan gaduh kambing sesuai dengan akad *Mudhahrabah* karena dibagi secara merata diantara kedua belah atas dasar kerelaan masing-masing pihak, serta penanggungan resiko gaduh kambing akad *mudharabah* karena beban kerugian ditanggung pemelihara sepenuhnya.⁷
5. Skripsi Shade Nadia Putri yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan*". Tahun 2019. Hasil penelitian menyimpulkan Bahwa pembebanan biaya resiko kerusakan

⁶Rusita Fitriana Arum Pratiwi, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan Tengkulak Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2019), i.

⁷Muhammad Syafi'udin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), i.

yang dilakukan oleh pihak operator diperbolehkan dalam Hukum Islam, karena pihak operator di sini menanggung biaya resiko kerusakan tersebut atas kerelaan dirinya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. karena di sini pihak operator ikut bertanggung jawab terhadap kerugian/kerusakan atau mendapat bagian tanggungan dari kerugian atau kerusakan yang disyaratkan oleh pihak pemilik maka syarat tersebut adalah *batil*.⁸

Berdasarkan kajian penelitian yang terdahulu dengan kajian penelitian penulis terdapat kesamaan dalam bentuk akad dalam bagi hasil *mudharabah* yang digunakan sebagai dasar hukum Islam dan metode penelitiannya yang merupakan metode penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan antara kajian penelitian yang terdahulu dengan kajian penelitian penulis adalah jenis usaha dalam praktik kerjasama bagi hasil, dimana penulis mengkaji terkait praktik kerjasama dalam penjualan Es Dawet.

H. Metode Penelitian

Secara ilmiah metode penelitian dapat diartikan sebagai salah satu cara atau jalan yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹ Komponen-komponen yang akan ditempuh dalam menggali dan menganalisa data untuk jawaban permasalahan, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung

⁸Shade Nadia Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), i.

⁹J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm.2-3.

dilakukan dilapangan atau dengan responden, yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi¹⁰. Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum Islam dari Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet yang melatarbelakangi faktor-faktor dalam hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain)¹¹. Dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, pelaksanaan terhadap praktik kerjasama dalam penjualan Es Dawet sesuai Hukum Islam di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada

¹⁰ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ket13 2014), hlm.26.

¹¹ Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.146.

mengumpul data, misalnya: lewat orang lain atau dokumen¹². Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan ini. Akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain : Hadist, buku, jurnal, skripsi, literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi beberapa orang.¹³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang, yaitu Supri sebagai pemilik es dawet tersebut dan 4 lainnya sebagai penjual Es Dawet ialah Lutfi, Dede, Mustofa, Sani.

b. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu, karena populasinya 5 orang, maka seluruhnya dijadikan sampel penelitian, sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode

¹²Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.137

¹³Susiadi, Metode Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 95.

¹⁴Nurul Zuriyah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.119.

pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah penjual Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

b. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan

kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet yang akan dikaji menggunakan analisis kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif, metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I menguraikan mengenai Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan Sistematika Pembahasan.

BAB ke II menguraikan tentang Landasan Teori terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah tentang

kajian teori yang berisi mengenai Tinjauan Tentang Akad dan *Mudharabah*.

BAB ke III menguraikan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian Usaha Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

BAB ke IV menguraikan Analisis Penelitian dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini terkait analisis mengenai Praktik Kerjasama antara Pemilik dan Pedagang Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

BAB ke V Penutup menguraikan terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan perjanjian atau kontrak. Salah satu prinsip muamalah ialah *an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (*ta'athi*). Melakukan akad dengan tulisan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak dan baik dalam satu majelis atau berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.¹

Dalam menetapkan hukum akad dengan perbuatan (*aqad ta'athi*), kalangan Syafi'iyah berpendapat, akad ini merupakan akad yang fasid lagi haram. Mereka beralasan bahwa akad ini tidak kuat dalam menunjukkan kerelaan para pihak karena kerelaan merupakan urusan yang tersembunyi dan tidak bisa diukur tanpa dilafalkan. Sedangkan kalangan Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah menyatakan akad dengan cara *ta'athi* (perbuatan atau isyarat) sah karena hal ini sudah menjadi *urf* ditengah masyarakat dan itu merupakan petunjuk nyata akan kerelaan dalam akad. Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, realitanya *bai'ta'athi* ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku

¹Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), hlm. 8.

ditengah masyarakat, baik di swalayan, maupun pasar-pasar modern lainnya.²

1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari bahasa Arab, *al"aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan syariat, maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.³

Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan, maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*). Akad ialah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.⁴

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku

²*Ibid.*, hlm. 405-406

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 51.

secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.⁵

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatan nya. Akad berarti keterikatan perkataan satu pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad.⁶

Mengenai konsepsi akad, mengikuti pandangan minoritas ahli hukum Islam klasik, yaitu bahwa akad meliputi baik tindakan-tindakan hukum sepihak seperti nazar, maupun tindakan-tindakan hukum dua pihak seperti jual beli, *syirkah*, *wakalah*, *wadiah* dan seterusnya. Kebanyakan ahli hukum Islam klasik dan boleh dikatakan semua ahli hukum Islam modern mengikuti paham sebaliknya, yaitu bahwa akad hanya meliputi tindakan hukum dua pihak saja, tidak mencakup tindakan hukum satu pihak. Lebih lanjut kitab ini membagi akad sebagai tindakan hukum dua pihak dari segi mengikatnya menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Akad yang pada dasarnya tidak mengikat kedua pihak, yang menurut ulama kita ini meliputi sembilan macam akad, antara lain: *syirkah*, *wakalah*, *Mudharabah*, utang piutang, pinjam pakai, *wadi'ah*;

⁵Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), hlm. 21.

⁶Muhammad Maksu, "Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", *Al-Adalah* Vol. XII No. 1 (Juni 2014), hlm. 51. (On-line), tersedia di :<http://ejournal.radenintan.ac.id>, (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 11 : 30 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- b. Akad yang mengikat kedua pihak, yang menurutnya berjumlah 15 macam akad, antara lain: akad jual beli, sewa menyewa, *musaqah*, *muzaraah*, *hawalah*, perdamaian, dan;
- c. Akad yang mengikat bagi satu pihak dan tidak mengikat bagi pihak lain, seperti gadai (*ar-rahn*) dan *kafalah*.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.⁸

Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak *syara'*, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.⁹

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam QS. *Al-Maaidah* (5) ayat 1 :

⁷ At-Tarusani, *Safinah al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham*, alih aksara Al-Yasa Abubakar dkk. (Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001), hlm. 195

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 71.

⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا
يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

3. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam perjanjian dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Misalnya pada syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual.¹⁰

Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian. Dalam konsep fikih, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dan keterikatan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.¹¹

¹⁰Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah....*, hlm. 25.

¹¹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 23.

a. Rukun Akad

Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas empat unsur, yaitu: *shighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*), *al-Aqid* (pelaku akad), *ma'qudalaih* (objek akad), dan *maudhu' akad* (tujuan akad). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas *ijab* dan *qabul* (*shighat*). Selain itu, mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad yaitu *maudhu' al-aqd* (akibat akad).

Sedangkan hal lain yang oleh jumhur ulama dipandang sebagai rukun, bagi mazhab Hanafi hanya dipandang sebagai *lawazim al-aqd* (hal-hal yang harus ada dalam setiap akad) dan terkadang disebut juga *muqawwimat al-aqd* (pilar-pilar akad). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* saja.¹²

1) *Al-Aqid* (pelaku akad atau para pihak yang berakad)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akad terjadi nya *ijab* dan *qabul* apabila tanpa adanya *aqid*. *Al-Aqid* atau pelaku akad yaitu bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyyah*) atau entitas hukum (*syakhsiah itibariyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:¹³

a) *Ahliyah* (Kompetensi)

Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi: Pertama, *Ahliyah Wujuh*, yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Kedua, *Ahliyyatul* yaitu pelaku

¹²Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah*..., hlm. 26

¹³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 24-25.

akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.

b) Wilayah

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*. Wilayah dalam arti bahasa adalah menguasai persoalan dan melaksanakannya. Menurut istilah *syara'*, pengertian wilayah adalah suatu keharusan yang diberikan oleh *syara'* yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan *tassaruf* (ucapan) dan melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa wilayah adalah kekuasaan yang diberikan oleh *syara'* kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misal masih dibawah umur. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.

2) *Ma'uqud Alaih* (objek akad)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Barang yang *Masyru'* (legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini disepakati

oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad mu'awadhat (bisnis) dan akad tabarru' (sosial).¹⁴

b) Objek yang dapat diserahkan terimakan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad.

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu'awadhah*. Menurut Imam Malik juga berlaku dalam akad *tabarru'*. Namun, Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru'* terhadap barang-barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.

c) Jelas diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka akad menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.¹⁵

3) *Maudhu' Akad* (Tujuan Akad)

Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, menurut para ulama *fiqh*, hanya diketahui melalui

¹⁴Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah*..., hlm. 33

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 46.

syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara', hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang meghalalkan riba.¹⁶

Jadi, motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan *syara* (hukum Islam), adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad *Mudharabah* yaitu kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan *skill* di pihak lain dan pembagian keuntungan.¹⁷

b. Syarat Akad

Disamping rukun, syarat akad juga harus dipenuhi agar akad itu

sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:¹⁸

- a) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu: (1) *Shighat (ijab qabul)*, objek akad (*ma'uqudalaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*). (2) Akad yang tidak mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran).

¹⁶Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 26.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah*..., hlm. 39.

(3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat-syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.

- b) Syarat sah akad. Secara umum, para *faqaha* menyetakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahya (*mufsid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- c) Syarat berlakunya (*Nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:
 - (a).Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas unruk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan.
 - (b).Harta yang akan di perjanjikan adalah milik sendiri dan tidak terdapat hak orang lain.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam ajaran Islam, karna itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau linnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalam nya. Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain :¹⁹

a. Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walaupun para pihak sepakat untuk melakukan.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.²⁰

b. Prinsip *Al-Musawwah*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan *universal* dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan Tuhan.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam

melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat

¹⁹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 23.

²⁰*Ibid*, hlm. 24.

dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.²¹

d. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti ; mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat atau bahaya

5. Berakhirnya Akad

Dalam fikih ditemukan konsep berakhirnya akad melalui dua kategori. Pertama, akad telah berakhir secara sempurna. Dalam bentuk akad seperti ini maka akad dapat berakhir dengan sempurna secara penuh dan sempurna tidak secara penuh. Untuk akad yang sempurna secara penuh dikenal dengan istilah doktrin *al-ifa'* yaitu akad telah sempurna dilaksanakan dan para pihak secara terbuka telah menerimanya serta tidak ditemukan lagi usaha-usaha untuk menarik diri dari akad karena akad telah berakhir.²²

Sedangkan yang kedua yaitu akad yang berakhir yang belum secara seluruhnya sempurna, umumnya akad seperti ini adakah akad yang salah satu dari objeknya belum sempurna seperti akad yang bersifat tangguh artinya harga (uang) atau objek (benda) belum diterima walaupun akad telah sempurna.²³

Berakhirnya akad dapat terjadi karena adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, kemudian karena adanya *infasakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

²¹*Ibid*, hlm. 26.

²²Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah*...., hlm. 41.

²³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*....hlm. 20.

a. Berakhirnya Akad dengan *Fasakh*

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu kedepan, seperti dalam *ijarah* (sewa- menyewa) dan *qardh* (utang piutang).

Yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi”. Dengan *Fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi. Demikian pula, objek kontrak. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan (*al-taradhi*) para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atau dasar putusan hakim (*al-qadhai*).

Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya *jaiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan *syari'ah*, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh*, dilakukan guna menghilangkan penyebab ke-*fasid* kontrak, menghormati ketentuan- ketentuan *syari'ah*, melindungi kepentingan (*mashlahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, kerugian), dan menghindari perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan *syari'ah*.

Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* yang disebabkan karena adanya hak *khiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan kesepakatan seperti *iqalah*. *Fasakh* terjadi karena hal-hal berikut:

1) Akad yang tidak lazim

Yang dimaksud tidak lazim (*jaiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk

membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh di *fasakh*.

2) Khiyar

Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syart khiyar aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*. *Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar aib*. Pada *khiyar aib*, kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh memfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

3) Iqalah

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW.

Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan *ridha* kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan *ridha* mereka. Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir

4) Jatuh Tempo

Fasakh karena jatuh tempo (habisnya waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.

5) *Uyub Ridha* (Cacat Ridha)

Akad juga bisa di-*fasakh* jika salah satu pihak tidak *ridha*, seperti ketika terjadi *tadlis* (penipuan), *ghoban*, *galath* (kekeliruan). Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-*fasakh* akad atau melanjutkan. Jika yang dipilih adalah *fasakh* maka akad yang telah disepakati itu berakhir.

Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat *ridha* itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar aib*). Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: Kontrak yang akan di-*fasakh* harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*); Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang diterapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak.

Dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau keselaannya untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya disebabkan terjadi kekeliruan (*galath*), pemaksaan (*ikrah*) dan penipuan (*tadlis*), ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak di-*fasakh*, baik atas

dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan hakim.²⁴

b. Berakhirnya Akad dengan *Infasakh*

Infasakh yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan (*istihalah al-tanfidz*) disebabkan *afat samawiyah* (*forcemajeure*). *Infasakh* terjadi karena hal-hal berikut:

1) Selesai Masa Kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2) Kontrak Tidak mungkin Ditindak lanjuti

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, misalnya dalam objek jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka akad tidak mungkin dilanjutkan, akad tersebut akan berakhir dengan sendirinya.

3) Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu atau pihak pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *Fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di-*fasakh* oleh kedua belah pihak atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad. Jadi, jika ada akad yang *fasid*, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Misalnya kasus jual beli, penjual menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau menjual sesuatu dengan dibatasi

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 50-52.

waktu. Maka jual beli semacam ini dipandang *fasid*, karenanya wajib untuk di *fasakh*, baik oleh pihak yang berkontrak maupun oleh hakim.²⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.²⁶

Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.²⁷ Definisi *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁸

Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya,

²⁵ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah*...., hlm. 56.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 169.

²⁷ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004,) hlm. 168

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Darul Fath, 2004), h. 217.

dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, 'amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja.²⁹

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2000 adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.³⁰

Mudharabah adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan. Dalam *Mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji

melakukan kerjasama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerjasama kemitraan tersebut, yang disebut *shahib-al-mal* atau *rabbul-maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagiannya telah disepakati.³¹

Mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah atau sebelum Islam datang. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bagi hasil: *Qiradh*,

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 476.

³⁰Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

³¹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 106.

muqaradhah dan *Mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip.³²

Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *Mudharabah*, sebaliknya Imam Malik dan Imam Syafi' menggunakan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*, mengikuti kebiasaan di Hijaz. Menurut bahasa, *qiradh* diambil dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qad''u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.³³

Mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihaknya, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan, memercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁴

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak yang rabbul maal menitipkan uangnya kepada pihak lain yang disebut *mudharib*. *mudharib* adalah memanfaatkan cara yang disepakati dan kemudian mengembalikan kepada rabbul maal, prinsipal dan bagian laba yang telah disepakati sebelumnya. Bank menyimpan untuk dirinya sendiri sisa-sisa keuntungan tersebut. Pembagian laba antara kedua belah pihak harus secara proporsional dan tidak dapat sekaligus atau dijamin kembali. Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar

³²Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 14.

³³*Ibid.*

³⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 151

modal yang telah dikontribusikan. Bank tidak ikut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.³⁵

Akad *Mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Dasar hukum kebolehan *Mudharabah* adalah *ijma'*, dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang), dengan kesamaan bahwa pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *Mudharabah* keduanya diperbolehkan karena keperluan.³⁶

Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.³⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

³⁵Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), hlm. 56.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara eksplisit Al-Qur'an tidak menyebutkan *Mudharabah* sebagai satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum, beberapa ayat menyiratkan kebolehan dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum *Mudharabah*. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam Firman Allah:

a) QS.Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Selain itu juga dalam surat lain yakni:

b) Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Adapun ijma' dalam *mudharabah*, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan *Mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Pada sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.³⁸

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْبَيَّاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁹

Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah* disyariatkan oleh firman Allah, hadist, ijma' dan qiyas dan diberlakukan pada masa Rasulullah saw dan beliau tidak melarangnya, karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun dan syarat *Mudharabah* dan menjadi persyaratan sah nya transaksi *Mudharabah* adalah:

- a. Pernyataan kehendak yang berupa ijab qobul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

³⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 224-226.

³⁹A. Djazuli, *Kaidaj-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

- 1) ijab dan qobul itu harus jelas menunjukan maksud untuk melakukan kegiatan *Mudharabah*.
- 2) ijab dan qobul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama.
- 3) ijab dan qobul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua, artinya kedua belah pihak sepakat dan ketika kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.⁴⁰

b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Syarat-syarat kedua belah pihak adalah akan bertindak hukum secara syar'i artinya, shahibul maal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola. Memiliki kewenangan atau kekuasaan serta menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.⁴¹

c. Adanya modal

Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut:

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada dibuatnya akad *Mudharabah* sehingga tidak menimbulkan dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlahnya. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam suatu kontrak.

⁴⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, h. 120

⁴¹ *Ibid.*

- 2) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama.
 - 3) Uang bersifat tunai (bukan hutang), jadi dana itu dapat dijalankan dalam suatu usaha.
 - 4) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena di khawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal penundaan yang dapat menggagu waktu mulai bekerja nya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal.⁴²
- d. Mengenai jenis usaha pengelola ini sebagian ulama, khusus nya *shafi'i* dan maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Tetapi Abu hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kerajina dan industri dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang dibolehkan adalah semua jenis usaha dan tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.
- e. Adanya keuntungan mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:
- 1) keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya setelah dipotong besarnya modal.
 - 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti shahibul maal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa perbuatan riba.

⁴² Ibid.

- 3) nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan adalah kesamaan.⁴³

4. Macam-Macam *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktifitas usaha, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.⁴⁴

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasan nya antara lain: tempat dan cara investasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 122.

⁴⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 163.

⁴⁵ *Ibid*.

5. Hak dan Kewajiban dalam *Mudharabah*

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lain. Kadang-kadang seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain ketika dia tidak mempunyai kemampuan pada satu bidang dan begitupun sebaliknya ketika seseorang itupun tidak memiliki keahlian pada bidang yang lainnya.

Misalnya, seseorang yang ahli dalam membuat suatu makanan tetapi dia tidak mampu untuk memasarkan makanan itu sendiri. Karena itu, dia membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang pemasaran. Disinilah terdapat interaksi sosial antara sesama manusia. Dan dari proses interaksi sosial inilah muncul suatu hak dan kewajiban. Jadi, hak muncul dari hubungan interaktif manusia yang satu dengan manusia lainnya.⁴⁶

a. Hak Pemilik Modal

Pemilik modal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola. Dengan demikian, pemilik modal hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *Mudharabah*.

Bagaimanapun juga, pemilik modal sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, maka hak yang demikian itu akan dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan pengelola menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *Mudharabah*, melakukan kelalaian dalam mengelola

⁴⁶Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cetakan I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

proyek atau usaha yang bersangkutan, atau bahkan kemungkinan melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat membahayakan investasi pemilik modal.

Pemilik modal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *Mudharabah* tersebut apabila usaha *Mudharabah* itu telah diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil likuidasi usaha *Mudharabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasitersebut.

b. Kewajiban Shabibul Mal

- 1) Kewajiban utama dari pemilik modal ialah menyerahkan modal *Mudharabah* kepada pengelola. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian *Mudharabah* menjadi tidak sah.
- 2) Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada pengelola untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

c. Hak dan Kewajiban Pengelola

- 1) Kewajiban Pengelola
 - a) Pengelola berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
 - b) Pengelola melakukan tugasnya tanpa boleh ada campur tangan dari pemilik modal yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
 - c) Pengelola berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada pemilik modal ditambah sebagian dari keuntungan dan pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Pengelola berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *Mudharabah* selama

mengurus urusan-urusan *Mudharabah* yang bersangkutan.

- d) Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (*prudent*) dan beriktikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*willful negligence*). Pengelola diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *Mudharabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.⁴⁷

6. Hal-Hal yang Dilarang dalam *Mudharabah*

- a. Membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri
- b. Menyedekahkan modal atau barang *Mudharabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal.
- c. Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal;
- d. Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.⁴⁸

7. Batal dan Berakhirnya *Mudharabah*

Kontrak *Mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair atau tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair atau tunai,

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 53-54.

⁴⁸ H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 156

kepada pengelola harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.⁴⁹

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit dan konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika *pemilik modal* menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi pengelola pengelola yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran.

Oleh karena itu, tidak melanggar Syariah jika para pihak setuju ketika memulai kontrak *Mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu. *Mudharabah* dianggap batal atau berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat, *Mudharabah*. Jika salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas melakukan berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan

⁴⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 64.

seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkan kerugian tersebut.

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *Mudharabah* menjadi batal.⁵⁰



⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 53-54.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Al Hadist

Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma ExamediaArkanleema.

Nailul, Authar. 1991. *Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, Surabaya :PT. Bina Ilmu.

B. Buku

Antonio dan Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: GemaInsani Press.

Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher.

Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dahlan, Abd Rahman, 2014, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-3.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Hadi, Sutrisno, 1981, *Metode Research, Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM.

Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press.

Hidayat, Enang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ja'far, H.A. Khumedi, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Lampung: Permatanet Publishing.

Jinan, Asep M, Abdullah. 2012. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Karim, Helmi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kartono, Kartini, 1999, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandar Maju.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana.

Mas'adi, Ghufroon A., 2002 *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cetakan I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moloeng, Lexy L, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2017, *Fikih Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah.

Muhammad, 2014, *Metode Penelitian Bahasa*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Muslich, Ahmad Wardi, 2017, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi, Ismail, 2017, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Nazir, Moh., 2009, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurdin, Ridwan, 2014, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena.

Nurdin, Ridwan, 2014, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena.

Raco, J.R., 2008, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. Jakarta:Grasindo.

Remi Sjahdeini, Sutan, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.

Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sahroni, Oni dan M.Hasanuddin, 2016, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Saleh, Noer dan Musanet, 1989, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung.

Sholihin, Ahmad Ilham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

C. Wawancara

Suprianto, Wawancara terhadap pemilik Es Dawet Ayu Manohara, (Alun-Alun Gedong Tataan: 05 Maret 2021).

Lutfiansyah, Wawancara terhadap pedagang Es Dawet Ayu Manohara, (Alun-Alun Gedong Tataan: 02 Maret 2021).

Dede, Wawancara terhadap pedagang Es Dawet Ayu Manohara,
(Alun-Alun Gedong Tataan: 04 Maret 2021).

Sanigustina, Wawancara terhadap pedagang Es Dawet Ayu
Manohara, (Alun-Alun Gedong Tataan: 04 Maret 2021).

Mustofa, Wawancara terhadap pedagang Es Dawet Ayu
Manohara, (Alun-Alun Gedong Tataan: 02 Maret 2021).



